

PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK : PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Zulkifli¹, Bunyamin Maftuh², Elly Malihah³
Email: zulkiflipkn85@gmail.com

Mahasiswa Departemen PKn SPS UPI¹
Dosen Departemen PKn SPS UPI^{2,3}

Abstrak

Multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dimiliki oleh bangsa di Indonesia. Multikulturalisme dapat diartikan bahwa negara memberikan pengakuan adanya keragaman atau kemajemukan pada masyarakatnya. Adanya keragaman ini mestinya menjadi dasar bagi pendidikan yang berkeadaban. Multikulturalisme menjadi landasan budaya bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan. Resolusi konflik yang menekankan pendidikan multikulturalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan dipandang memiliki urgensi yang penting karena secara historis bangsa ini telah melewati konflik karena budaya yang cukup pahit. Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia, secara filosofik dan substantif-pedagogis/andragogis. Perlu dikembangkan budaya kewarganegaraan Indonesia yang multikultural, yang berintikan “*civic virtue*” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kabajikan itu sepenuhnya harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultural. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani yang multikultural berdasarkan Pancasila.

Kata Kunci: *Multikulturalisme, Resolusi Konflik, Pendidikan Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah satu kesatuan besar yang terdiri dari beberapa kelompok kecil. Dari Aceh sampai Papua terbentuk dari sekumpulan kelompok, dimana kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi. Layaknya sebuah ekosistem, tahapan menuju individu, populasi, komunitas juga terbentuk karena proses panjang.

Negara bangsa Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain. Hefner (2007:16) Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007:33). Kondisi di atas tergambar dalam prinsip *bhinneka tunggal ika*, yang berarti meskipun Indonesia adalah *berbhinneka*, tetapi terintegrasi dalam kesatuan.

PBB mencatat sebanyak 75 persen dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural. PBB pun mencanangkan dialog untuk menjembatani budaya demi menciptakan perdamaian. Tindakan sederhana yang disarankan PBB untuk merayakan keberagaman budaya antara lain mengunjungi pameran kebudayaan, mendengarkan musik dari kebudayaan berbeda, mengundang tetangga beda agama atau suku untuk makan bersama, atau menonton film yang berkisah seputar budaya berbeda. Di Indonesia sendiri khususnya, dalam perjalannya tentu tidak semudah yang dibayangkan, negara yang berproses dengan berbagai perbedaan untuk saling menyatukan telah melalui berbagai konflik yang terjadi dan tak mudah. Proses tersebut menjadi catatan sejarah bangsa sebagai pembelajaran resolusi konflik yang terjadi kepada bangsa ini.

Berdasarkan laporan dari Tempo (2016) setidaknya terdapat beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan konflik kultural, diantaranya meliputi:

1. Tragedi Sampit

Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Tempo mencatat konflik bermula pada 18 Februari 2001 saat empat anggota keluarga Madura, Matayo, Haris, Kama dan istrinya, tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Massa meminta agar Timil menyerahkan pelaku pembunuhan itu. Karena

permintaan mereka tidak dituruti, massa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi. Sayang, pembakaran terus meluas ke rumah-rumah lainnya.

Warga Dayak pinggiran Sampit pun mulai berdatangan, baik melalui darat maupun sungai. Etnis Madura dikejar dan dibunuh. Penduduk asli sepertinya tahu di mana kantong-kantong warga Madura berada. Tua-muda pria-wanita menjadi sasaran pembunuhan. Di beberapa ruas jalan, tampak bergelimangan tubuh korban tanpa kepala. Sebagian besar warga dari etnis Madura harus diungsikan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Korban bertambah dan sudah tidak bisa dihitung berapa rumah dan fasilitas umum yang terbakar. Diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari ini.

2. Konflik Maluku

Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yakni sampai 4 tahun.

3. Konflik 1998

Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial pada penghujung Orde Baru. Jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa. Perempuan keturunan Tionghoa bahkan menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan dalam kerusuhan itu. Banyak yang diperkosa, dianiaya, lalu dibunuh. Di antara etnis Tionghoa, banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari keselamatan.

Oleh karenanya tentu catatan kelam tersebut perlu menjadi pembelajaran dan dihindari karena sebagai bangsa kedewasaannya terjadi karena berproses dalam dinamika multikulturalisme. Maka melihat dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan penulis merasa perlu melihatnya dan menganalisis karena memandang pentingnya peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai solusi meminimalisir ancaman disintegrasi bangsa dan memperkuat multikulturalisme di Indonesia.

Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *citizenship education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional

masing-masing negara. Namun secara umum, tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warganegara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya keragaman etnis dan ras serta suku bangsa merupakan kenyataan yang harus diterima. Secara tata hukum perundang-undangan, kenyataan tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang merangkum kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam UUD RI 1945 juga telah dengan tegas menyatakan tentang kenyataan multikultural bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan juga akan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa dan bertekad sebagai suatu bangsa yang mempunyai satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air; Indonesia.

Terkait dengan pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2004: 192), yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.

Sedangkan menurut Cogan (1998: 115), kompetensi yang harus nampak pada diri warga negara sebagai masyarakat yang multikultural adalah:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global;
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
3. Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis;
5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan;
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan HAM;

8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Kebhinnekaan sebagai kenyataan sosial yang terjadi di Indonesia dapat menjadi modal untuk melangkah ke masyarakat yang lebih demokratis yang terdidik. Menurut Ritzer dalam Yaqin, A (2005: 193), keragaman etnis yang terbentuk dari definisi sosial dan bukan merupakan definisi berdasarkan pada faktor keturunan/biologis, dan ras yang didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik kulturalnya (bahasa, agama, asal suku atau asal negara, tata hidup sehari-hari, makanan pokok, cara berpakaian atau ciri-ciri kultur yang lainnya) bukan untuk mengukur tingkat keberbedaan dan saling melemahkan.

Keberbedaan tersebut dimaksudkan agar saling kenal mengenal dengan segala dimensi keunikan dan kekayaan budaya yang dimiliki manusia. Dari beberapa keberbedaan tersebut tetap ada sifat-sifat universal yang dimiliki manusia. Dengan keuniversalan tersebut, mereka (warga negara) mampu berempati dan bersimpati, sehingga mampu memahami keberadaan orang lain di luar dirinya dengan berbagai keragaman budaya (*cultural diversity*). Pemahaman terhadap sifat keuniversalan manusia tersebut, akan mampu menjadikan mereka dapat berpikir untuk melewati batas-batas budayanya sendiri, sehingga tampak seperti orang yang berwawasan universal tersebut yang menunjukkan sikapnya yang toleran dan menghargai pluralitas.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Multikultural

Istilah multikultur berakar dari kata kultur. Pada umumnya, kultur diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu (Ainul Yaqin, 2005: 6). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan *isme* (aliran/paham) (H.A.R Tilaar, 2004). Multikultur merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan, sedang awalannya adalah multi yang berarti banyak, ragam, atau aneka. Dengan demikian, multikultur berarti keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan.

Secara khusus, H.A.R. Tilaar (2000:39-40) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti kebudayaan merupakan suatu kesatuan dan bukan jumlah dari bagian-bagian.

Keseluruhan mempunyai pola-pola atau desain tertentu yang unik. Setiap kebudayaan mempunyai mozaik yang spesifik yang bercirikan:

1. Kebudayaan merupakan prestasi kreasi manusia yang bersifat immateri. Artinya berupa bentuk-bentuk prestasi psikologis seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni dan sebagainya;
2. Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik seperti hasil seni, dan terbentuknya kelompok-kelompok keluarga;
3. Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum, adat-istiadat yang berkesinambungan;
4. Kebudayaan merupakan suatu realitas yang obyektif yang dapat dilihat,;
5. Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter atau terasing, tetapi yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu;
6. Kebudayaan merupakan perwujudan dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diberikan oleh Allah.

Berdasarkan apa yang dikemukakan H.A.R. Tilaar jelas tergambar bahwa kebudayaan merupakan sebuah keniscayaan yang dimiliki manusia dan merupakan hasil karya yang unik dan bersifat beragam.

Multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi-kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sebagai sebuah paham menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Bagi H.A.R Tilaar, multikulturalisme bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi juga telah merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut. Multikulturalisme merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (etnis), dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Secara sederhana, Azra (2006: 157) memberikan definisi sederhana tentang pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan atau bahkan dunis secara keseluruhan. Sedangkan menurut Musa Asy'arie (2004), pendidikan multikultural adalah

proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” se usai Perang Dunia II. Hal ini terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional.

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Multikulturalisme

Untuk Pendidikan kewarganegaraan yang sekarang ada di Indonesia memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di tumbuh kembangkan dalam tradisi Citizenship Education yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun, secara umum menurut Nu'man Somantri (2001) dalam pendapatnya tujuan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Sedangkan menurut pendapat A. Kosasih Djahiri (1994/1995:10) adapun tujuan pembelajaran PKn adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum tujuan PKn harus mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional yaitu : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani

kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

- b. Secara khusus PKn bertujuan untuk : membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi umumnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang kritis dan warga negara partisipatif. Warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibilities*) mengandung arti bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhannya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta masyarakat dan bangsa dan negaranya. Warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) dalam arti cerdas secara moral, cerdas secara spiritual, dan cerdas emosional. Warga negara yang kritis adalah warga negara yang memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, serta kemauan kuat dalam memberikan alternative pemecahan masalah tersebut. Kemudian warga negara yang partisipatif yakni warga negara yang penuh kesadaran yang tinggi untuk melibatkan diri atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, mengingat membuat keputusan merupakan salah satu kompetensi atau kemampuan dasar warga negara. Adapun kemampuan dasar lainnya adalah memperoleh informasi serta menggunakan informasi, ketertiban, berkomunikasi, kerjasama, dan melakukan berbagai macam kepentingan secara benar.

Dalam hal tersebut Wahab (1996) mengidentifikasi warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajiban sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan peranannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelligence*), memiliki disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif

agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*).

Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara disekitarnya serta memelihara dan memanfaatkan lingkungan-nya secara bertanggung jawab (Wahab, 1996).

Namun dipandang terlalu luas sehingga mengakibatkan terjadinya kekeliruan dan kekaburan dalam penyajian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (Numan Somantri, 2001). Materi-materi yang mencakup masalah etika, moral, agama, aspek-aspek kehidupan yang dianggap positif, sejarah kebangkitan nasional, sejarah perjuangan kemerdekaan, Pancasila, UUD 1945, budi pekerti, ketahanan sosial dan sebagainya. Cakupan materi yang begitu luas inilah yang sering membingungkan masyarakat umum bahkan kalangan komunitas PKn sendiri. Untuk membantu pemahaman para praktisi khususya guru, Numan Somantri (2001) mengemukakan bahwa tujuan PKn hendaknya dirinci dalam tujuh kurikuler yang meliputi : (1) Ilmu pengetahuan, yang mencakup fakta konsep, dan generalisasi, (2) ketrampilan intelektual, dari ketrampilan sederhana sampai ketrampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang shahih, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; dan (4) ketrampilan sosial.

Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan yang diajukan oleh *Centre for Civic Education* pada tahun 1999 dalam *National Standard for Civics and Government*. Ketiga komponen tersebut, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) (Branson, 1999: 8-25).

Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan bebas yang tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggungjawab warganegara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik (Depdiknas, 2002:10).

Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial

keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik. Sedangkan dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas (Depdiknas, 2002: 11).

Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru (*new paradigm*). Dengan visi memberikan penekanan yang lebih kuat pada nation and character, pemberdayaan warganegara (*citizen empowerment*), dan memperkuat berkembangnya masyarakat kewargaan (*civil society*). Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalah pembentukan warganegara yang baik (*good citizen*), yang memiliki ciri-ciri: aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewarganegaraan (*civil culture*), dan berpikir kritis dan kreatif (Cholisin, 2003: 1).

Jack Allen (1960) dalam Soemantri (2001: 83) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai hasil seluruh program sekolah, bukan merupakan program tunggal ilmu-ilmu sosial dan bukan sekedar rangkaian pelajaran tentang kewarganegaraan. Akan tetapi, kewarganegaraan mempunyai fungsi yang penting untuk melakukan atau melaksanakan, yaitu menghadapkan remaja (peserta didik) pada pengalaman di sekolahnya tentang pandangan yang menyeluruh terhadap fungsi kewarganegaraan sebagai hak dan tanggung jawab dalam suasana yang demokratis.

Hal senada juga ditegaskan oleh Nu'man Soemantri (2001: 299) yang menyatakan bahwa PKn yang sekiranya akan cocok dengan Indonesia adalah sebagai berikut: "...Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Dalam materi latihan kerja guru PPKn depdiknas (2002: 2), dinyatakan bahwa PPKn adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Juga bermaksud membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan, dan

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Cogan (1998), beberapa perkiraan kecenderungan global menurut para ahli, pakar kebijakan dan peramal, bersama temuan-temuan hasil penelitiannya menyarankan bahwa gaya mendidik kewarganegaraan saat ini belum cukup untuk memasuki abad baru. Mereka menuntut warga negara agar dapat memfokuskan kajian pada unsur-unsur, isu-isu, dan konteks yang berbeda secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah Cogan (1998) merekomendasikan bahwa kebijakan pendidikan di masa depan harus berdasarkan pada suatu konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai koneksi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat pada abad ke-21.

Tujuan utama dari kehendak negara yang memprogramkan pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah untuk mengembangkan warga negara yang mengenal, menerima, dan menghayati serta menyadari perannya sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab yang berkenaan dengan peradaban dan moral dalam kehidupan masyarakat yang demokratis seperti perilakunya diatur oleh prinsip-prinsip moral dalam segala situasi. Secara singkat tujuan yang terfokus pada status kewarganegaraannya adalah untuk pengembangan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap pembentukan suatu masyarakat yang adil dan mampu melindungi orang atau makhluk lain dari kekejaman dan sebagai bangsa yang merdeka dan demokratis. Di beberapa negara, tujuan ini didukung oleh Undang Undang Dasar, Ketetapan dan peraturan negara masing-masing (CICED, 1999: 73).

Atas dasar tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan di atas, maka fungsi PKn dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat;
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antar warga negara dengan sesama warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui serta mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga negara. (Depdiknas, Proyek PKn dan BP (2000: 21)

Pembelajaran PKn akan membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, pemerintahan, nilai-moral budaya bangsa sebagai identitas bangsa, nasionalisme, ekonomi dan nilai-nilai masyarakat lainnya; pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang memiliki identitas/jati diri sebagai bangsa Indonesia; pengayaan sumber belajar, bahwa sumber belajar tidak hanya di dalam kelas dan dari buku teks, melainkan diperkaya dengan pengalaman belajar mandiri dari peserta didik yang relevan, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan menemukan sendiri bagaimana berperan serta dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara dengan menggunakan berbagai media sebagai hasil teknologi; keteladanan dari nilai-nilai dan prinsip yang dikembangkan dalam PKn melalui sikap dan perilaku sehari-hari sehingga peserta didik memiliki panutan dalam mewujudkan perilaku yang diharapkan; hidup bersama dengan orang lain sebagai satu bangsa, bahwa mata pelajaran PKn termasuk dalam rumpun PIPS, menekankan bagaimana manusia sebagai warga negara dapat bekerja sama dengan orang lain, saling menghormati, menghargai,...damai,...cita-cita bangsa. (Arnie Fadjar, 2005: 61)

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berakhlak yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi issue kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya;
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (BSNP, 2006)

Apa yang dikemukakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut terlihat bahwa anak didik dipersiapkan untuk mempunyai kemampuan

berpikir kritis, rasional dan kreatif yang diwujudkan dalam partisipasinya sebagai warganegara yang mempunyai identitas kebangsaan yang kuat, di tengah-tengah masyarakat internasional.

Implementasi Pendidikan Multikultural

Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap Negara berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing Negara. Banks (1993) mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.

1. Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*). Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertamadari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan/pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah dilakukan di Indonesia.
2. Pendekatan aditif (*aditif approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Pendekatan aditif sebenarnya merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural, sebab belum menyentuh kurikulum utama.
3. Pendekatan transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Siswa doleh melihat dari perspektif yang lain. Banks (1993) menyebut ini sebagai proses multiple acculturation, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesame dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda (multiple acculturation conception) dari masyarakat dan budaya Negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, music, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya secara umum. Budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar.

4. Pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*) mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaran dan pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial sehingga kelompok-kelompok etnis, ras dan golongan-golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Perlunya Pendidikan Multikultural di Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Maslikhah (2007: 159), setidaknya ada tujuh alasan, mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan dan dijadikan model pendidikan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia: *Pertama*, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. *Kedua*, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. *Ketiga*, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. *Keempat*, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. *Kelima*, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. *Keenam*, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. *Ketujuh*, pendidikan multikultural sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ke-Tuhanan.

Sedangkan Djahiri mengemukakan bahwa pendidikan multikultural diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri merupakan program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki nasionalisme (rasa

kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat bangsa dan negaranya, taat asas/ketentuan (rule of law), demokratis, dan partisipasi aktif-kreatif-positif dalam *kebhinnekaan* kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (*civil society*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati dirinya. (CICED, 1999: 58)

Oleh karenanya, pendidikan multikultural harus menjadi sinergi dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam pendidikan multikultural, tidak akan ada perbedaan kebutuhan, baik yang bersifat intelektual, spritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomi, budaya, dan transendental dari seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola berbagai kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai suatu simulasi arena hidup nyata yang plural, terus berubah dan berkembang. Institusi sekolah dan kelas adalah wahana hidup dengan pemeran utama peserta didik di saat guru dan seluruh tenaga kependidikan berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dikelola sebagai dialog dan pengayaan pengalaman hidup unik, sehingga bisa tumbuh pengalaman dan kesadaran kolektif setiap warga dan peserta didik yang kelak menjadi dasar etika politik berbasis etika kewargaan.

Pendidikan multikultural didasari konsep kebermaknaan perbedaan secara unik pada tiap orang dan masyarakat. Kelas disusun dengan anggota kian kecil hingga tiap peserta didik memperoleh peluang belajar semakin besar sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif di antara peserta didik. Pada tahap lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif melampaui batas teritori kelas, kebangsaan dan nasionalitas, melampaui teritori teologi keagamaan dari tiap agama berbeda.

Gagasan itu didasari asumsi, tiap manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik dan berbeda-beda. Perbedaan adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia daripada kesamaannya. Kegiatan belajar-mengajar bukan ditujukan agar peserta didik menguasai sebanyak mungkin materi ilmu atau nilai, tetapi bagaimana tiap peserta didik mengalami sendiri proses berilmu dan hidup di ruang kelas dan lingkungan sekolah.

Karena itu, guru tidak lagi ditempatkan sebagai aktor tunggal terpenting sebagai kamus berjalan yang serba tahu dan serba bisa. Guru yang afisien dan produktif ialah jika bisa menciptakan situasi sehingga tiap peserta didik belajar dengan cara sendiri yang unik. Kelas disusun bukan untuk mengubur identitas personal, tetapi memperbesar peluang tiap peserta didik mengaktualkan kedirian masing-masing. Pendidikan sebagai transfer ilmu dan nilai tidak memadai, namun bagaimana tiap peserta didik menemukan dan mengalami situasi beripitek dan berkehidupan otentik.

Dengan adanya pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maka diharapkan akan mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain itu, juga diharapkan akan menumbuhkan toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain.

Yang menjadi permasalahan dalam menerapkan pendidikan multikultural dalam pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan di Indonesia kebanyakan masih berciri “pendidikan bergaya bank” seperti apa yang dikemukakan oleh Paulo Freire sehingga perlu adanya perubahan paradigma seperti dikemukakan sebagai berikut:

1. Siswa harus dianggap sebagai manusia yang utuh, yang punya naluri, kesadaran, kepribadian, eksistensi, dan keterbatasan. Atas dasar tersebut maka siswa akan mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungannya;
2. Perlunya diubah antagonis pendidikan di Indonesia sebagai “pendidikan bergaya bank”, seperti: guru mengajar, murid belajar; guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; guru berpikir, murid dipikirkan; guru bicara, murid mendengarkan; guru mengatur, murid diatur; guru memilih dan memaksakan kehendaknya, murid menuruti; guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya; guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri; guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid; guru adalah subyek proses belajar, murid objeknya.
3. Guru dan Siswa harus saling belajar serta saling memanusiakan, sehingga hubungan keduanya merupakan subjek-subjek, bukan subjek-objek;
4. Siswa harusnya menjadi subjek yang belajar, bertindak dan berpikir serta berbicara mengenai hasil tindakan dan pemikirannya.

5. Guru harusnya tidak bersifat masih bangga dengan peran reaksionernya yang gembira yaitu peran yang masih konservatif dan unkreatif.

Hal semacam itu akan bisa menjadi suatu kenyataan apabila tentu saja salah satunya didukung oleh adanya kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Beberapa kompetensi yang dipersyaratkan mutlak dimiliki oleh seorang guru adalah: **pertama**, mampu menjelaskan dan meyakinkan siswa untuk memahami maksud dan tujuan dari materi yang akan diajarkan; **kedua**, mampu berperan dan berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing dalam melayani keperluan siswa saat mengikuti proses belajar mengajar; **ketiga**, mampu mengembangkan metode pendekatan belajar mengajar individual, interaktif dan kolaboratif untuk menciptakan siswa aktif; **keempat**, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan di dalam dan di luar kelas; **kelima**, dalam pembelajaran multikultural seorang guru harus menjelmakan dirinya sebagai seorang pribadi antar budaya, dan lain-lain; **keenam**, mampu mengembangkan komunikasi yang efektif (lugas dan luwes), dalam membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka; dan **ketujuh**, mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh (Saputra, L.S: 2007:4).

KESIMPULAN

Multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dimiliki oleh bangsa di Indonesia. Multikulturalisme dapat diartikan bahwa negara memberikan pengakuan adanya keragaman atau kemajemukan pada masyarakatnya. Adanya keragaman ini mestinya menjadi dasar bagi pendidikan yang berkeadaban. Multikulturalisme menjadi landasan budaya bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.

Resolusi konflik yang menekankan pendidikan multikulturalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan dipandang memiliki urgensi yang penting karena secara historis bangsa ini telah melewati konflik karena budaya yang cukup pahit. Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional.

Pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai resolusi konflik dalam jangka panjang dapat membantu hal membekalinya pengetahuan sebagai warga negara. Warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berpikir kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter (multikultur) masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia, secara filosofik dan substantif-pedagogis/andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-bhinneka tunggal ika. Perlu dikembangkan budaya kewarganegaraan Indonesia yang multikultural, yang berintikan “*civic virtue*” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kebajikan itu sepenuhnya harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultural. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani yang multikultural berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2006). *Pancasila dan Identitas Nasional: Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: Fisip UI, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Brighton Institute Bogor, Kelompok Tempo Media.
- Asy'arie, M. (2004). *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa. dalam harian Kompas, Edisi Jum'at*, 3.
- Banks, James A. (1993). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Banks, James A (2001). *Handbook of Research on Multicultural Education 2nd Edition*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Budimansyah, D. (2007). “Warganegara Multidimensi Untuk Menghadapi Tantangan Abad Ke-21”. Makalah pada Seminar Invecs. Bandung.
- Branson, M. S. (1999). *Making the case for civic education: Where we stand at the end of the 20th century*. Washington: CCE.
- Chamim, Asykuri Ibn. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan Berkeabadian*. Jakarta: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- Cholisin, C. (2004). Konsolidasi demokrasi melalui pengembangan karakter kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 1(1).
- Center for Indonesia Civic Education. (1999). *Democratic Citizens In a Civic Society: Building Rationales for the 21 Century's Civic Education*. Bandung.

- Cogan, J. J., & Derricott, B. J. (1998). *Multidimensional Civic Education*.
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung: CISED.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah*. Jakarta: Puskur, Balitbang Depdiknas.
- Djahiri, A. K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. LP3 IPS FKIS IKIP Bandung.
- Fadjar, A. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas: Tinjauan Praksis*. Makalah pada Seminar Nasional dan Rakernas Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung.
- Hefner, R. W. (2007). *Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius.
- Maslikhah, Q. V. P. M., (2007). *Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*. Salatiga: STAIN Salatiga Press bekerjasama dengan JP Books.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sapriya dan Winataputra, Udin S. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Saputra, L. S. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*. PT Grafindo Media Pratama.
- Saputra, L.S. (2007). "Refleksi Terhadap Pembelajaran PKn: Kajian Terhadap Pembelajaran PKn Sebagai Pembelajaran Multikultural". Makalah pada Seminar Invics. Bandung.
- Soemantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Kerjasama Program Pascasarjana dengan PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R.. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, A. A. (1996). *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Menuju Warga Negara Global*. IKIP. Bandung.
- Wahab dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Yaqin, Ainul. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- <https://nasional.tempo.co/read/668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia> diakses 10 April 2020

